



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. MARWIN

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. NUR SYAM, M.Si

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Januari 2017

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Prof. Dr. NUR SYAM, M.Si

Drs. H. MARWIN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Islam yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 2. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Kristen yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 3. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 4. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 5. Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan 6. Persentase lembaga sosial keagamaan Islam yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 7. Persentase lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 8. Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 9. Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 10. Persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 	<p>448 Orang</p> <p>53 orang</p> <p>30 Orang</p> <p>9 Orang</p> <p>100 Orang</p> <p>100%</p> <p>6%</p> <p>22,22%</p> <p>20%</p> <p>10%</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama	1. Jumlah FKUB pada tingkat kabupaten Kota 2. Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Sekber FKUB yang memenuhi standar 3. Jumlah dialog kerukunan untuk meningkatkan kerukunan intern umat beragama	7 lembaga 0% 14 kegiatan
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan 2. Jumlah Rumah Ibadah Agama Islam yang Difasilitasi untuk Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya 3. Jumlah rumah ibadah Agama Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 4. Jumlah rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 5. Jumlah rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya 6. Jumlah rumah ibadah Agama Buddha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya	53 KUA 0 Rumah Ibadah 5 Rumah Ibadah 1 Rumah Ibadah 0 Rumah Ibadah 7 Rumah Ibadah
4.	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	1. Dana Zakat yang terhimpun (Miliar Rupiah) 2. Jumlah lembaga zakat yang memenuhi standar pelayanan minimal 3. Persentase tanah wakaf bersertifikat	Rp. 8.000.000.000 15 lembaga 40%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, efisien, dan akuntabel	1. Jumlah jemaah haji yang dilayani 2. Jumlah pembimbing haji bersertifikat	1.295 Orang 0 Orang
6.	Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	1. Persentase temuan BPK, BPKP dan Itjen yang ditindaklanjuti	100%
7.	Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)	1. Jumlah siswa MI/ Ula 2. Jumlah siswa MTs/ Wustha 3. Jumlah siswa MA/ Ulya	1.360 siswa 71 siswa 1.484 siswa 210 siswa 553 siswa 99 siswa
8.	Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi	1. APK RA 2. APK MI Ula 3. APM MI Ula 4. APK MTs Wustha 5. APK MA 6. APM MA	6,50% 5,36% 0,17% 4,80% 0,17% 8,63% 0,52% 5,32% 4,28
9.	Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan	1. Angka putus sekolah MI/ULA 2. Angka putus sekolah MTs / Wustha 3. Angka putus sekolah MA	0,2% 0,2% 0,0%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pendidikan RA yang terakreditasi minimal B 2. Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B 3. Persentase MTs yang terakreditasi minimal B 4. Persentase MA yang terakreditasi minimal B 5. Rata-rata nilai ujian sekolah MTs/SMPTK 6. Rata-rata nilai ujian sekolah MA/SMATK 	<p>18,86%</p> <p>63,49%</p> <p>54,10%</p> <p>64,71%</p> <p>53,14%</p> <p>47,77%</p>
11.	Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional pada pendidikan umum berciri khas agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 2. Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi 	<p>75,64%</p> <p>26,33%</p>
12.	Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat 2. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat 3. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat 4. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat 5. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat 6. Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Khonghucu bersertifikat 	<p>41,83%</p> <p>10%</p> <p>100%</p> <p>33%</p> <p>100%</p> <p>0%</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
13.	Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama	1. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam 2. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen 3. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik 4. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu (Pasraman) 5. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma) 6. Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Konghucu	200.000 siswa 26.370 siswa 600 siswa 183 siswa 400 siswa 430 siswa

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	Rp.	27.945.402.000
2.	Kerukunan Umat Beragama	Rp.	1.154.000.000
3.	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp.	36.109.438.000
4.	Pendidikan Islam	Rp.	181.100.180.000
5.	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp.	5.744.326.000
6.	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp.	2.285.740.000
7.	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp.	1.334.200.000
8.	Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp.	10.323.724.000
9.	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp.	8.431.527.000

Tanjungpinang, Januari 2017

Sekretaris Jenderal

Kepala Kantor Wilayah

Prof. Dr. NUR SYAM, M.Si

Drs. H. MARWIN